

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Tidak semua penerimaan pajak berjalan lancar dengan semestinya. Berdasarkan data dari KPP Pratama Cianjur bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp 452.427.818.557, atau 22,77%. Hal ini berarti target penerimaan pajak pada 2015 tidak sesuai dengan target yang dicapai atau yang ditetapkan. Masalah ini diakibatkan ada kecenderungan penerimaan pajak sering meleset.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi

disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak pertambahan nilai meliputi pengaturan tentang:

1. Jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak
2. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak
3. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak

Fenomena yang terjadi pada kasus Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan data dari KPP Cianjur bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak terutama penerimaan PPN di Tahun 2015 hal ini disebabkan oleh adanya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Berikut disajikan tabel target dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cianjur.

Tahun	Target Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN	Penerimaan PPN (%)
2012	Rp. 76.059.645.041	Rp. 68.773.306.051	90,42
2013	Rp. 71.731.268.352	Rp. 95.486.726.021	133,1
2014	Rp. 99.405.283.503	Rp. 106.204.361.765	106,7
2015	Rp. 167.512.908.928	Rp. 136.097.644.715	81,64

Berdasarkan data tersebut, angka penerimaan pajak mengalami fluktuatif. Hal ini bisa jadi karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan maupun pengurangan penghasilan yang dilaporkan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Semua

kegiatan dan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berikut disajikan tabel daftar wajib pajak KPP Pratama Cianjur.

No	Jenis Wajib Pajak	Tahun		Total
		2014	2015	
1.	Orang Pribadi	123.597	137.021	260.618
2.	Badan	7.385	8.149	15.534
3.	Bendahara	3.769	4.339	8.108
Jumlah		134.751	149.509	284.260

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2015 sedikitnya 149.509 wajib pajak baik perorangan maupun lembaga. Menurut Hasan Basri selaku Kepala KPP Pratama cianjur, dari angka tersebut hanya 47.842 wajib pajak atau 32 persen yang baru sadar membayar pajak. Rendahnya dalam membayar pajak disebabkan oleh beberapa hal, pertama sebagian wajib pajak belum memahami tentang mekanisme pembayaran pajak, lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak mangkir dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak, wajib pajak belum percaya sepenuhnya terhadap pihak KPP, dan wajib pajak malas dalam membayar pajak dikarenakan persyaratannya yang terlalu rumit.

Wajib pajak harusnya memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang pengetahuan perpajakan, apabila pengetahuan perpajakannya rendah maka berakibat pada wajib pajak itu sendiri yaitu dengan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, dan belum tahu tentang manfaat dan kegunaan dari penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka

semakin tinggi juga tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan dengan memberikan sosialisasi pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak maka dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak baru atau wajib yang sudah terdaftar.

Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak mengaku penerimaan negara dari pajak masih minim dan belum memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Menurut Fuad Rahmany selaku Ditjen Pajak, kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak masih minim. Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah peraturan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Peraturan tersebut adalah PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Pada KPP Pratama Cianjur peraturan tersebut belum berlaku sepenuhnya dikarenakan database pajak masih belum valid terkait dengan data pajak seperti NPWP dan alamat sehingga pada tahun 2015 penyampaian surat pemberitahuan di KPP Pratama Cianjur masih dilakukan secara manual.

Oleh karena itu, peneliti menelaah masalah diatas tersebut diatas dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Cianjur Kabupaten Cianjur”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan data awal dalam latar belakang permasalahan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Tidak tercapainya target penerimaan pajak pertambahan Nilai pada tahun 2015 disebabkan oleh pengembalian penerimaan pajak (restitusi).
- 2) Sebagian wajib pajak belum memahami tentang mekanisme pembayaran pajak.
- 3) Lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak mangkir dalam membayar pajaknya.
- 4) Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak KPP terhadap wajib pajak.
- 5) Wajib pajak belum mempercayai sepenuhnya terhadap pihak KPP.
- 6) Wajib pajak malas dalam membayar pajak dikarenakan persyaratan yang terlalu rumit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur?

- 2) Seberapa besar pengaruh cara sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur?
- 3) Seberapa besar pengaruh media informasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yakni:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyuluhan dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cara sosialisasi dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat berguna bagi setiap orang.

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk meningkatkan serta mengembangkan teori administrasi, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2) Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana peningkatan kemampuan menulis, serta dapat mengembangkan wawasan bagi penulis dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai perpajakan.

2. Bagi Universitas

Sebagai bahan pengembangan lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori administrasi perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan perpajakan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

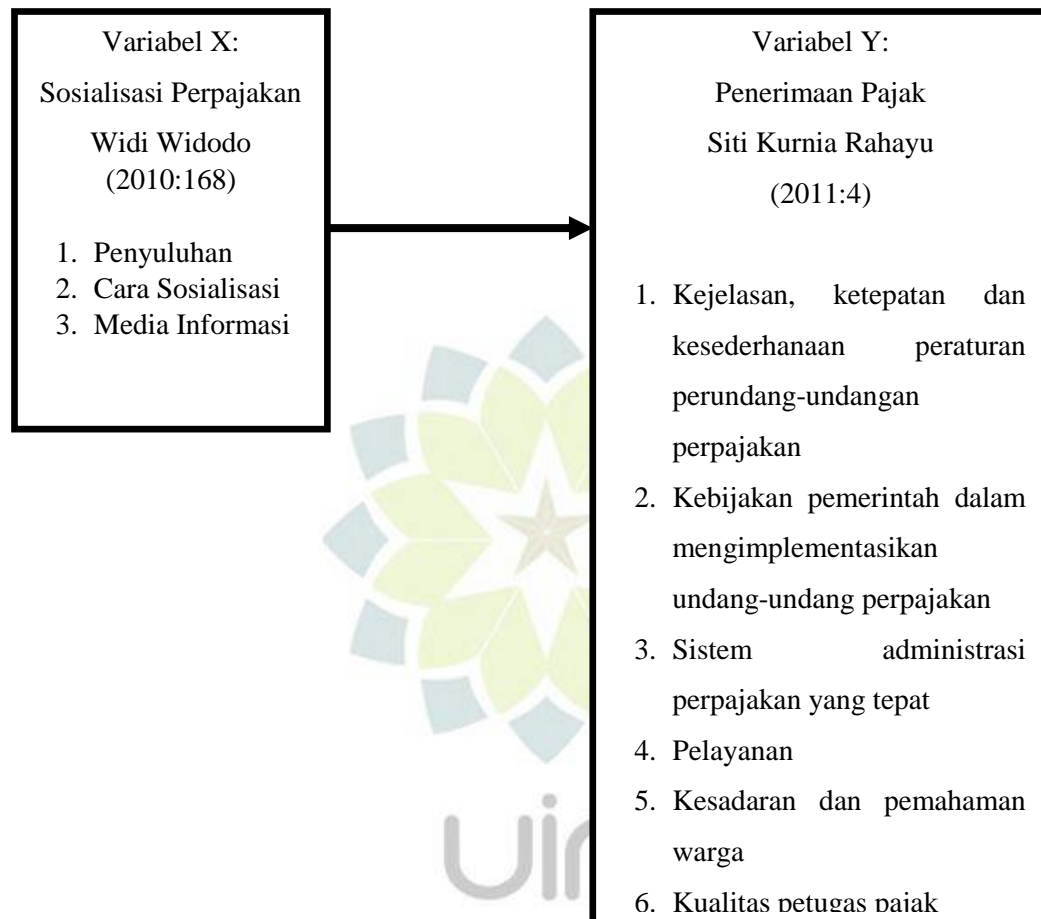
Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik dan menjadi indikator dan komponen dalam sosialisasi perpajakan. Indikator dan komponen yang dikembangkan oleh Widodo (2010) mencakup 3 indikator, yaitu: *penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan*.

Maka, berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Model Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2009:55) mendefinisikan bahwa hipotesis merupakan alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukan itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran.

Berdasarkan acuan dari kerangka pikir di atas maka peneliti menyusun hipotesis penelitian yang berpedoman pada teori hipotesis asosiatif. Menurut Arikunto (2009:56) Hipotesis asosiatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1.	<p>Ho: $\beta_i = 0$</p> <p>Ha: $\beta_i \neq 0$</p>	<p>Tidak ada pengaruh penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur berdasarkan penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan.</p> <p>Ada pengaruh penyuluhan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur berdasarkan penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan.</p>
2.	<p>Ho: $\beta_i = 0$</p> <p>Ha: $\beta_i \neq 0$</p>	<p>Tidak ada pengaruh cara sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur berdasarkan penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan.</p> <p>Ada pengaruh cara terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur berdasarkan penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan.</p>

3.	Ho: $\beta_i = 0$ Ha: $\beta_i \neq 0$	Tidak ada pengaruh media informasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur berdasarkan penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan. Ada pengaruh cara terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cianjur berdasarkan penyuluhan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan.
----	---	---